



REVIEW - RENCANA STRATEGIS (REVIEW - RENSTRA)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

TAHUN 2016 – 2021

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Wonogiri
Jalan RM. Said Wonogiri Telp. (0273) 322805 Fax. 322804
Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Prinsip otonomi daerah setidaknya mempunyai tiga aspek, yaitu:

- i. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- ii. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan Nasional.
- iii. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

Kebijakan penerapan otonomi daerah secara ringkas bertujuan antara lain;

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan umum;
- c. Untuk meningkatkan daya saing daerah.

Berdasarkan pengertian, prinsip dan tujuan dari otonomi daerah, maka menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkannya. Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Kesejahteraan merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan dasar penunjang kehidupan yang wajib disediakan oleh Negara. Pelayanan dasar tersebut diantaranya; keamanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur pendukung, dan lain sebagainya. Untuk mempercepat dan mendekatkan pelayanan pemerintahan tersebut, maka tugas dan kewenangan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Agar tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka menjadi kewajiban pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat efisien dan efektif, maka pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dimulai dari peningkatan fungsi utama, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional serta berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stake holders*). Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan daerah juga harus tersedia dan digunakan secara optimal untuk kepentingan pencapaian tujuan keuangan daerah. Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, *komprensif* dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penggunaan sarana dan prasarana pendukung secara optimal dilakukan melalui tahapan perencanaan (pengadaan barang dan jasa) yang matang, mengacu pada visi pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2016 – 2021, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Review Rencana Strategis (Review RENSTRA) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri terpilih.

Review Rencana Strategis BPKD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKD sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dokumen tersebut juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala BPKD dengan Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri. Sebagai tindak lanjut dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “Membangun Wonogiri “Sukses”, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis “, yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri maka pelaksanaan program - kegiatan yang menjadi prioritas daerah tersebut, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun Review Rencana Strategis.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan. Ada enam bidang dan satu sekretariat pada BPKD, yaitu Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Penatausahaan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Aset Daerah, dan Sekretariat. Pembagian tugas pokok masing-masing bidang antara lain; (1). Bidang Pendaftaran dan Penetapan, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pengendalian operasional; (2). Bidang Penagihan dan Penatausahaan, tugas pokoknya melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penagihan, keberatan dan

penatausahaan; (3). Bidang Anggaran, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang anggaran, belanja tidak langsung, dan pembiayaan; (4). Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang perbendaharaan dan kas daerah; (5). Bidang Akuntansi, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan; (6). Bidang Aset Daerah, tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah; (7). Sekretariat, tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan badan.

Fungsi dan peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri menjadi sangat penting. Peran penting tersebut diantaranya meningkatkan pendapatan asli daerah, serta melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Jika semua peran penting tersebut berjalan dengan baik, sinergis, dan dengan perencanaan yang matang, maka dapat mendukung terwujudnya suatu daerah dengan Pemerintahan yang Kredibel dan Efektif. Hal tersebut demi Membangun Wonogiri “Sukses” , Beriman, Berdaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis sesuai dengan Visi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri masa jabatan 2016 – 2021.

1.2. Landasan Hukum

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- v. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- vi. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 121);
- vii. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025;
- viii. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021.
- ix. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Review RENSTRA ialah sebagai rumusan strategi, kebijakan, dan program kerja selama 5 (lima) tahun untuk mencapai visi dan misi organisasi. Review Rencana Strategis BPKD Kabupaten Wonogiri mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan serta panduan bahwa program kegiatan yang direncanakan dan disusun sudah mengakomodir upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah seperti yang ditetapkan dalam RPJMD , perkiraan anggaran yang dibutuhkan tentunya dengan memperhatikan celah fiskal daerah dan pagu anggaran jangka menengah yang sudah disepakati bersama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dokumen Review RENSTRA yang disusun berisi penjabaran program dan kegiatan OPD-BPKD selama 5 tahun (2016-2021). Hal tersebut dimaksudkan agar Review

RENSTRA ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh aparatur pengelola keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri khususnya di lingkungan organisasi BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan dan penetapan Review RENSTRA juga ditujukan agar seluruh pelaksanaan program kegiatan pada lingkungan organisasi BPKD dapat terencana, terarah dan terukur, sehingga dapat mencapai tujuan sesuai visi dan misi organisasi.

Penyusunan Review RENSTRA BPKD Kabupaten Wonogiri disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri. Dokumen perencanaan dengan orientasi jangka panjang dapat diidentifikasi sebagai upaya untuk mendesain kondisi yang dicita-citakan di masa mendatang. Kerangka berpikir yang mengacu pada cita-cita masa mendatang diharapkan memberi kejelasan dan mengarahkan pada rumusan masa depan daerah seperti yang sudah di tuangkan dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

Selaras dengan rencana pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Nawa Cita, maka tujuan, sasaran dan strategi BPKD Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021 diarahkan untuk dapat ikut mendukung tercapainya Nawa Cita tersebut. Khususnya pada Cita ke 2, 3, dan 9 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nawa Cita ke 2 yaitu, membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Jika dijelaskan spesifik lagi maka apa yang ingin dicapai oleh Nawa Cita ke 2 yang sesuai dengan konteks pengelolaan keuangan daerah maka:
 - 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan;
 - 2) Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3) Terwujudnya reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui *citizen charter* dalam UU kontrak layanan publik.
2. Nawa Cita ke 3 yaitu, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Untuk melaksanakan hal tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Terwujudnya sinergitas tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi;
 - 2) Terwujudnya reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan Nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris;
 - 3) Meningkatnya alokasi belanja untuk pelayanan publik melalui: penguatan Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
3. Nawa Cita ke 9 yaitu, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam agenda tersebut yang mempunyai kaitan erat dengan pembangunan di daerah dengan mengedepankan nilai-nilai lokal yang dimiliki (*local wisdom*), yaitu:
- 1) Terwujudnya pembangunan kembali modal sosial melalui metode rekonstruksi sosial.

Tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai kemudian dirumuskan kedalam visi dan misi daerah. Rumusan visi setidaknya harus ada dalam dokumen-dokumen berikut ini:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis (RENSTRA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. Review Rencana Strategis (RENSTRA) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Visi RPJPD adalah sebagai penggerak roda perekonomian daerah agar daerah dapat tumbuh dan berkembang. Visi RPJMD adalah untuk memberikan arah pembangunan yang jelas 5 tahun mendatang sebagai sebuah konsekuensi dari sasaran 5 tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Review Rencana Strategis – OPD mempunyai rumusan visi berorientasi untuk mengetahui target yang tertuang dalam RPJMD terkait tugas dan fungsi OPD.

Rencana pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tahapan penting dalam manajemen organisasi sektor publik. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah setidaknya memuat hal-hal pokok antara lain; potensi pendapatan daerah, permasalahan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan pertanggung jawaban atas anggaran yang dikelola kepada para pemangku kepentingan, yang kesemuanya direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab IV Penyusunan dan Penetapan APBD pasal 16 ayat (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan

daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Pasal 17 ayat (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Jelas dari apa yang telah dituangkan dalam Undang-undang tentang keuangan Negara tersebut bahwa wujud dari pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun selalu dikelola dan dipertanggungjawabkan. Menjadi tugas dan fungsi dari BPKD sebagai OPD yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dengan bantuan dan keterkaitan dengan OPD yang lain.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III: ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4.2. Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VI: INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VII: PENUTUP

7.1. Program Transisi

7.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Permasalahan utama pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri ialah belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang terjadi selama ini ialah pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri belum berkontribusi maksimal terhadap total pendapatan daerah. Besaran pendapatan asli daerah yang diterima masih dikisaran 10% sampai 11% dari total pendapatan daerah setiap tahun anggaran. Selain belum optimalnya pendapatan asli daerah, masalah pengelolaan dan pelaporan aset daerah juga merupakan masalah lain yang tidak kalah penting. Pada setiap akhir tahun anggaran, ketika menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masalah yang dihadapi terkait dengan pengakuan dan penyajian aset daerah dalam laporan keuangan.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, para pemangku kepentingan yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemangku kewenangan yaitu eksekutif duduk bersama membahas permasalahan yang dihadapi serta mengambil kebijakan strategis untuk dapat mengatasi masalah utama tersebut. Kebijakan yang diambil tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelebihan atau potensi yang dimiliki daerah dan peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1) Kepala Badan

Tugas pokok Kepala BPKD yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2) Sekretariat Badan, membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Sekretaris BPKD yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan badan.

3) Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi:

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
- b. Sub Bidang Penetapan
- c. Sub Bidang Pengendalian Operasional

Tugas pokok kepala bidang tersebut yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pengendalian operasional;

4) Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan, membawahi:

- a. Sub Bidang Penagihan
- b. Sub Bidang Keberatan
- c. Sub Bidang Penatausahaan

Tugas pokok kepala bidang tersebut yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan.

5) Kepala Bidang Anggaran, membawahi:

- a. Sub Bidang Anggaran I
- b. Sub Bidang Anggaran II
- c. Sub Bidang Anggaran III

Tugas pokok kepala bidang tersebut yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang anggaran, belanja tidak langsung, dan pembiayaan.

6) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:

- a. Sub Bidang Perbendaharaan I
- b. Sub Bidang Perbendaharaan II
- c. Sub Bidang Kas Daerah

Tugas pokok kepala bidang tersebut yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang perbendaharaan dan kas daerah.

7) Kepala Bidang Akuntansi, membawahi:

- a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
- b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
- c. Sub Bidang Pelaporan

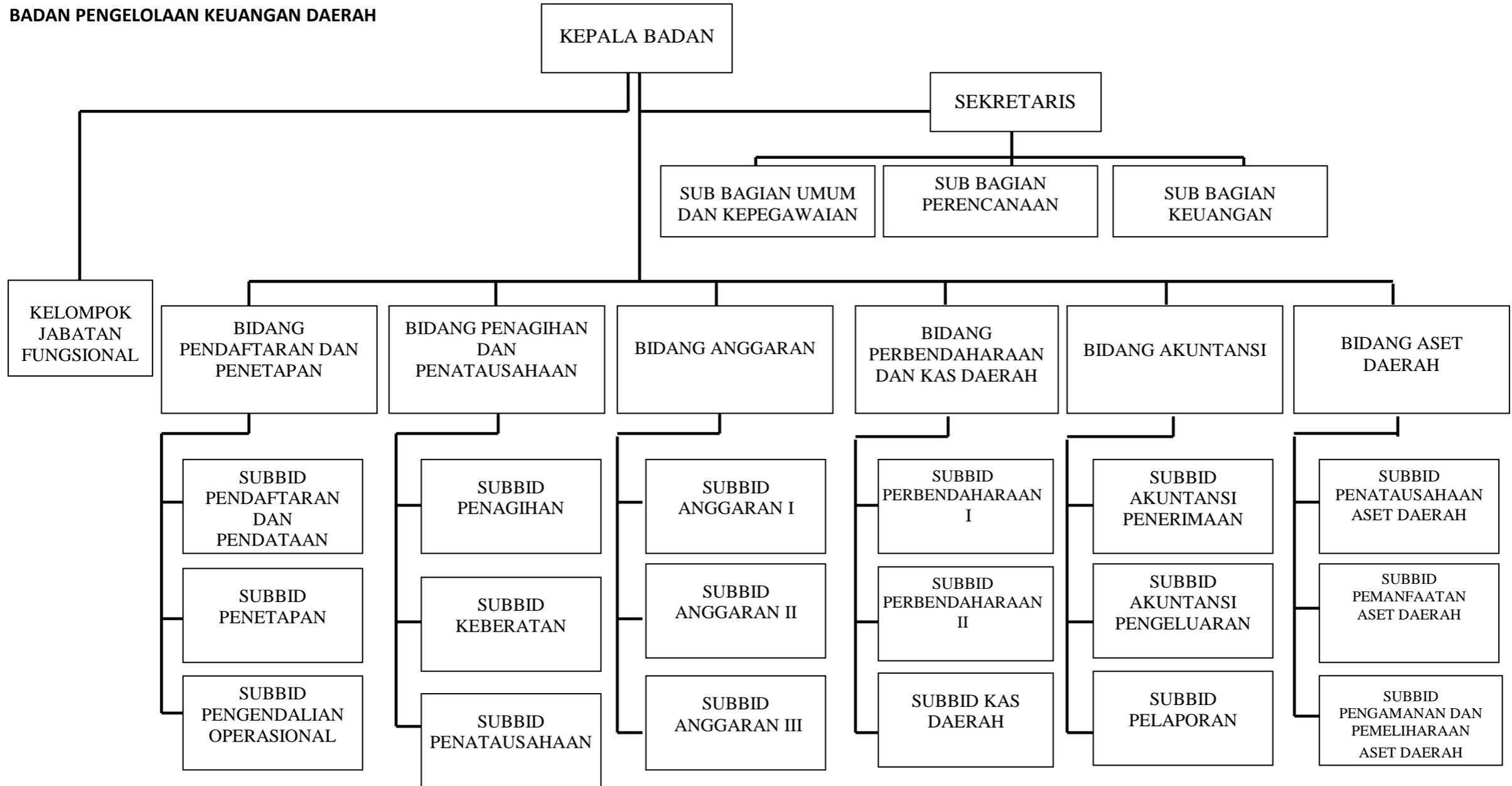
Tugas pokok kepala bidang tersebut yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan.

8) Kepala Bidang Aset Daerah, membawahi:

- a. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
- b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
- c. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Tugas pokok kepala bidang tersebut yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016

Kelompok Jabatan

No.	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	IIA	-	-
2.	IIB	1	Kepala Dinas
3.	IIIA	1	Sekretaris Dinas
4.	IIIB	6	Kabid
5.	IVA	21	Kasubag/Kasi
6.	IVB	1	Kasubag TU
7.	FUNGSIONAL UMUM	60	Staf
Jumlah		90	

Kelompok Unit/Satuan Kerja

No.	Keterangan	PNS/CPNS
1.	Kepala Badan	1/0
2.	Sekretariat	17/0
3.	Bidang Pendaftaran dan Penetapan	12/0
4.	Bidang Penagihan dan Penatausahaan	15/0
5.	Bidang Anggaran	9/0
5.	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	16/0
6.	Bidang Akuntansi	10/0
7.	Bidang Aset Daerah	10/0
Jumlah		90/0

Kelompok Tingkat Pendidikan:

No.	Tingkat Pendidikan Umum	PNS/CPNS
1.	S-2	18/0
2.	S-1/D-IV	37/0
3.	D-III	20/0
4.	D-II	0/0
5.	D-I	0/0
6.	SLTA	14/0
7.	SLTP	1/0
Jumlah		90/0

2) Sumber Daya Aset/Modal

Data Inventaris Gedung/Kantor

No.	Jenis Gedung	Peruntukan
1.	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Badan, Sekretariat Badan, Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Penatausahaan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Aset Daerah, Ruang Pelayanan Pajak Daerah.

Data Inventaris Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Sepeda Motor	38 unit	38 unit	40 unit
2.	Mobil	8 unit	9 unit	10 unit

Data Inventaris Lainnya

No.	Jenis Peralatan Gedung Kantor	Tahun			Keterangan
		2014	2015	2016	
1.	Komputer/PC	60 unit	67 unit	76 unit	Kondisi baik
2.	Laptop/Notebook	25 unit	27 unit	40 unit	Kondisi baik
3.	Mesin Rizograph	4 unit	4 unit	4 unit	Kondisi baik
4.	Pendingin Ruangan (AC)	31 unit	36 unit	38 unit	Kondisi baik
5.	Aplikasi Komputer	9 aplikasi	9 aplikasi	11 aplikasi	Kondisi baik
6.	Printer	61 unit	64 unit	70 unit	Kondisi baik
7.	Server	8 Unit	8 Unit	7 unit	Kondisi baik
8.	Genset	1 unit	1 unit	1 unit	Kondisi baik
9.	Komputer Tablet	7 unit	7 unit	6 unit	Kondisi baik
10.	Mesin Collator	2 unit	2 unit	-	Kondisi baik
11.	Audio Conference	2 unit	2 unit	2 unit	Kondisi baik
12.	LCD Proyektor	3 unit	3 unit	7 unit	Kondisi baik
13.	UPS Besar (6.800 VA)	1 unit	1 unit	3 unit	Kondisi baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri terbentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Terdiri dari Sekretariat, Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Penatausahaan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset Daerah. Sesuai Permendagri 13 tahun 2006 melaksanakan Urusan Wajib yakni Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Program yang dilaksanakan tahun 2016– 2021 meliputi 5 (lima) program yang ada pada setiap OPD serta 3 (tiga) program urusan. Program yang ada pada setiap OPD meliputi:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melaksanakan 3 (tiga) Program, yakni:

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- 3) Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

Kinerja pelayanan OPD–BPKD dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 ada pada lampiran I (Realisasi Program dan Kegiatan DPPKAD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015).

Sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri : “Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah”, maka kondisi yang diinginkan sesuai visi–misi BPKD yang diaplikasikan dalam sasaran dan kebijakan yang nyata. Dalam usaha mewujudkan visi tersebut pada perjalanannya menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan bisa muncul dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). Kesemuanya tentu memerlukan pengelolaan (manajemen) yang baik agar tujuan bersama dapat tercapai. Tantangan biasanya muncul dari luar, karena organisasi harus dinamis, sesuai dengan perkembangan informasi, adanya peraturan baru, dan pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan.

1) Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan tersebut diatas antara lain;

- a. Pencairan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Pengeluaran Pembiayaan agar berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan;
- b. Pengajuan SPM dari seluruh OPD agar berpedoman pada surat edaran dan disesuaikan dengan anggaran kas pada DPA dan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran;
- c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan cara:
 - a) Melakukan pendataan potensi pendapatan daerah baru;
 - b) Optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang sudah ada;
 - c) Sosialisasi kepada wajib pajak dan tokoh masyarakat terkait peraturan yang melandasi pengenaan pajak dan retribusi;
 - d) Pendekatan persuasif kepada wajib pajak dan retribusi agar taat memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak/retribusi sesuai ketentuan.
- d. Mengoptimalkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Melakukan regenerasi sumber daya manusia pengelola keuangan dan peningkatan sarpras secara bertahap, sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- e. Penyediaan gudang arsip yang memadai;
- f. Komitmen dari seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan tata kelola Barang Milik Daerah yang baik;
- g. Memberi honor/insentif yang memadai kepada para Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang;
- h. Melaksanakan bintek dan pembinaan secara rutin kepada semua Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang di 1035 Unit Pengelola Barang (UPB);
- i. Perlu adanya kerjasama dan pendampingan dari Pemerintah Pusat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) untuk mengelola pendaerahan PBB-P2;
- j. Perlu kerjasama antara KPP Pratama dengan Pemerintah Daerah, sehingga piutang pajak tersebut jelas sesuai dengan Subyek dan Obyeknya serta Nomor Obyek Pajaknya. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi untuk direkomendasikan dihapus dengan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- k. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, dilakukan persiapan antara lain:
 - a) Secara bertahap telah dilakukan pengadaan perangkat komputer, server, dan aplikasi pengelolaan keuangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010;
 - b) Upaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dilakukan dengan cara mengadakan diklat/bintek serta memberdayakan PNS yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi secara optimal. Jika peraturan yang berlaku memungkinkan, maka tugas administrasi keuangan OPD dapat dilaksanakan oleh pegawai NonPNS.
- m. Strategi pemecahan permasalahan terkait dokumen perencanaan program dan kegiatan yaitu dengan mengadakan review RKA dan penyusunan Indeks Belanja sebagai acuan penyusunan DPA dan DPPA.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri: “Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah”, maka kondisi yang diinginkan sesuai visi–misi organisasi yang diaplikasikan dalam sasaran dan kebijakan yang nyata. Dalam usaha untuk mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada perjalanannya menghadapi berbagai tantangan dari luar (*eksternal*). Tantangan tersebut memerlukan pengelolaan (manajemen) yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 – 2021 antara lain:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih rendah;
2. Struktur alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penetapannya belum sepenuhnya berdasarkan pada analisa prioritas menurut situasi, kondisi, dan potensi yang ada;

3. Terbatasnya dana APBD sehingga belum sepenuhnya mampu mendanai program dan kegiatan sesuai kebutuhan;
4. Pengelolaan aset daerah yang belum optimal;
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas/belum memadai.

Tantangan akan selalu muncul bersamaan dengan peluang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri melalui peraturan yang ada selalu berusaha untuk melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan visi organisasi. Peluang yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 – 2021 antara lain:

- a. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Wonogiri;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan daerah;
- c. Komitmen pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah;
- d. Tersedianya instrumen pengelolaan Keuangan Negara/Daerah berupa peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. Adanya standardisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah belum sebanding dengan anggaran belanja yang harus dikeluarkan;
- Banyaknya temuan hasil pemeriksaan internal yang mencerminkan pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien;
- Sumber daya manusia pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai masih terbatas;
- Peningkatan pendapatan asli daerah masih belum sesuai target ideal, sehingga diperlukan adanya regulasi untuk mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal Kewenangan SKPD	Eksternal Kewenangan SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Realisasi Capaian Kinerja Sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase PAD dibanding Pendapatan Daerah. - TA. 2014 : Penerimaan Daerah: Rp. 1.712.058.136.149 PAD : Rp.182.022.232.761 Prosentase : 10,63% - TA. 2015 : Penerimaan Daerah: Rp.1.963.704.545.728 PAD : Rp.211.208.608.200 Prosentase : 10,75% - TA. 2016 : Penerimaan Daerah: Rp.2.035.012.718.115 PAD : Rp.218.561.037.345 Prosentase : 10,74% 	<ul style="list-style-type: none"> - Target peningkatan PAD 10% tiap tahun. - Penetapan target peningkatan PAD masih mengacu pada kenaikan rata-rata tiap tahun, belum mengacu pada tingkat kenaikan ideal. 	Pengajuan target peningkatan PAD pada saat pembahasan Rancangan APBD.	Penetapan target PAD pada APBD.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah belum sebanding dengan anggaran belanja yang harus dikeluarkan . Peningkatan pendapatan asli daerah masih belum sesuai target ideal, sehingga

					diperlukan adanya regulasi untuk mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
	Penilaian BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Proses penyusunan anggaran, penatausahaan, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ada di BPKD.	Usulan rencana kerja beserta anggaran yang dibutuhkan, dan rincian rencana belanja, menjadi kewenangan masing-masing OPD.	c. Banyaknya temuan hasil pemeriksaan internal yang mencerminkan pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien; d. Sumber daya manusia pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai masih terbatas.

Selain permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, ada kendala teknis pada saat pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

- a. Pengajuan pencairan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Pembiayaan masih banyak yang kurang berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan, sehingga masih sering terjadi berkas pengajuan dikembalikan untuk direvisi dan dilengkapi;
- b. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari OPD menumpuk di akhir tahun anggaran;
- c. Potensi pendapatan daerah yang terbatas;
- d. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi atas kewajiban yang melekat padanya;
- e. Kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai;

- f. Penataan arsip belum bisa memadai;
- g. Komitmen dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang masih kurang dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri;
- h. Insentif yang diberikan untuk Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang belum memadai;
- i. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang belum sepenuhnya memahami ketentuan/peraturan pengelolaan BMD;
- j. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, belum didukung dengan basis data yang baik. Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang ada tidak sinkron dengan data yang diserahkan;
- k. Piutang PBB-P2 yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah akan menjadi piutang pajak;
- l. Insentif PBB sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sesuai dengan yang diharapkan terutama tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- m. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual memerlukan ketersediaan sarana/prasarana dan kapasitas SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
- n. Permasalahan terkait dokumen perencanaan program dan kegiatan, diantaranya keterlambatan pengiriman Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Masih sering terjadi kesalahan posting anggaran belanja OPD utamanya dalam penempatan obyek belanja dan rincian obyek belanja. Pembuatan DPA/DPPA tidak memperhatikan Standarisasi Indeks Belanja.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka OPD-BPKD mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan Misi ke-1, yaitu: “Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen

Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi". Misi tersebut dijabarkan kedalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong untuk mencapai misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Visi : MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN DEMOKRATIS				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 1 : Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi.</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah belum sebanding dengan anggaran belanja yang harus dikeluarkan.</p> <p>2. Banyaknya temuan hasil pemeriksaan internal yang mencerminkan pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien.</p> <p>3. Sumber daya manusia pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai masih terbatas.</p> <p>4. Peningkatan pendapatan asli daerah masih belum sesuai target ideal, sehingga diperlukan adanya regulasi untuk mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.</p>	<p>1. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah.</p> <p>2. Terbatasnya dana APBD sehingga belum sepenuhnya mampu mendanai program dan kegiatan sesuai kebutuhan</p> <p>3. Pengelolaan aset daerah yang belum optimal</p> <p>4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih belum ideal.</p>	<p>1. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Wonogiri</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan daerah</p> <p>3. Komitmen pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah</p> <p>4. Tersedianya instrumen pengelolaan Keuangan Negara/Daerah berupa peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pelaksanaannya</p> <p>5. Adanya standarisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.</p>

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan isue strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memperhatikan isue-isue yang berkembang.

- Lingkungan Nasional:
Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas, hal ini terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan masih belum optimal, anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih sangat besar.
- Lingkungan Regional/Lokal Kewilayahan:
Keterbatasan APBD, pos anggaran untuk belanja rutin (belanja pegawai) lebih dari 50% dari APBD. Hal tersebut menyebabkan anggaran untuk pembangunan kurang dari 50%.

Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemampuannya (tidak hanya tergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat) dengan cara meningkatkan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Proporsi belanja daerah masih didominasi belanja rutin (belanja pegawai dan belanja tidak langsung), sedangkan anggaran untuk belanja langsung (belanja modal, barang dan jasa) masih sangat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis pembangunan di Kabupaten Wonogiri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ialah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- Berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan bantuan dana dari pemerintah pusat;
- Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, pendataan potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, namun tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
- Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif, akuntabel, tepat waktu, mutu dan sasaran;
- Pengelolaan aset daerah secara tertib dan terpelihara.

Identifikasi Isu–Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis		
	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal Kewilayahan	Lain – lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Hal ini	Keterbatasan APBD, pos anggaran untuk belanja	

	terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan masih belum optimal dan anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti subsidi BBM masih sangat besar.	rutin (belanja pegawai) lebih dari 50% dari APBD. Hal tersebut menyebabkan anggaran untuk pembangunan kurang dari 50 %.	
--	---	---	--

Review Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tidak dilengkapi dengan Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Provinsi, serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS. Hal tersebut karena Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

BAB IV

VISI-MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri: “Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah”. Untuk mencapai visi tersebut maka misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ialah “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Tujuan Strategis

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi jangka menengah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merumuskan tujuan sesuai dengan misi ke-1 dari Bupati Wonogiri yakni Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi. Tujuan dari misi BPKD ialah “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”.

B. Sasaran Strategis

Perumusan dan penetapan sasaran strategis disesuaikan dengan sasaran strategis yang ada pada RPJMD Kabupaten Wonogiri. Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran pada Review RENSTRA BPKD. Yaitu sesuai dengan misi pertama Kabupaten Wonogiri “Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi”. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan organisasi BPKD Kabupaten Wonogiri dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi BPKD: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tujuan: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	
Sasaran:	1. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; 2. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah; 3. Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.
Arah kebijakan:	1. Peningkatan kualitas sumber daya pengelola keuangan;
	2. Peningkatan kualitas penatausahaan barang milik daerah;
	3. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan dari pajak daerah.
Program:	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
	2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
	3. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

Tabel 4.1.

Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.	2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.	3. Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Strategi diperlukan tidak saja untuk mencapai tujuan dan sasaran, tetapi juga untuk memberikan dorongan dan arahan bagi setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati dan dijadikan pedoman bagi aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan sinergitas dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai. Penetapan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian BPKD Kabupaten Wonogiri sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. (Mendagri, 2010a). Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Guna mewujudkan Visi - Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri serta dalam rangka mencapai tujuan strategi dan arah kebijakan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2016 - 2021 ialah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib/yang ada pada setiap OPD:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Urusan Pemerintahan bidang keuangan (yang merupakan program Prioritas yang mendukung misi I):

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan serba mengembangkan tata kelola keuangan daerah.
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah. Aset daerah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak mulai dari tahapan perencanaan, proses penambahan atau pengurangan aset, serta bagaimana aset daerah dikelola dan dilaporkan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Rencana strategis dirumuskan dan ditetapkan untuk mengatur arah program dan kegiatan operasional organisasi serta perkembangannya untuk meraih

keberhasilan di masa kini dan di masa mendatang. Keberhasilan yang dimaksud dapat dicapai jika ada dukungan alokasi dana APBD maupun APBN serta adanya komitmen penuh dan didukung sepenuhnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri beserta seluruh aparatur didalamnya.

Tabel 5.1.
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan Pelaksanaan.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Pelaksana
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Bidang Anggaran 2. Bidang Perbendaharaan 3. Bidang Akuntansi 4. Sekretariat
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	1. Bidang Aset Daerah
Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah.	1. Bidang Pendaftaran dan Penetapan; 2. Bidang Penagihan dan Penatausahaan.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016– 2021, ada pada Lampiran II.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

2.1. Deskripsi/Penjelasan

Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah Indikator Capaian kinerja yang mana tujuan sarannya harus sesuai dengan RPJMD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah masuk pada Misi ke-1 yaitu Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Manajerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi yang dalam penjabarannya terbagi dalam beberapa program yaitu :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- c. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja dan target capaian setiap tahun BPKD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja OPD–BPKD yang Mengacu Pada Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016- 2021.

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Keuangan								
1	Persentase tertib administrasi keuangan daerah.	88	88	89	90	90	91	91	91
2	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.	80	80	82,5	85	87,5	87,5	90	90
3	Persentase pendapatan asli daerah meningkat	9	9	9,5	9,75	10	10,5	11	11

BAB VII PENUTUP

7.1. Program Transisi

Review Rencana Strategis (Review RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 – 2021 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) berikut kerangka pendanaan program dan kegiatan yang ditetapkan setiap tahunnya. Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam Review RENSTRA ini harus diwujudkan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kerja tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Rencana ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk membangun Kabupaten Wonogiri 5 (lima) tahun kedepan.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Review RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 -2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja – OPD. Pelaksanaannya memerlukan peran serta dari para pengambil kebijakan. Selain sebagai pedoman dalam penyusunan Renja, Review RENSTRA merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Semoga dokumen Review RENSTRA ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

Lampiran IV

Proyeksi Belanja Daerah Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2016 – 2021 (Jutaan rupiah)

NO.	URAIAN POS BELANJA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Belanja Tidak Langsung	1.552.641,80	1.695.156,70	1.882.176,40	2.130.973,60	2.465.632,30	2.919.734,80
1	Belanja Pegawai	1.271.093,00	1.302.870,30	1.335.442,10	1.368.828,10	1.403.048,80	1.438.125,10
2	Belanja Bantuan Keuangan Pada Pemerintah Desa	280.548,80	391.286,40	545.734,30	761.145,50	1.061.583,50	1.480.609,70
3	Belanja Tidak Terduga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II.	Belanja Langsung	183.094,40	193.606,00	204.969,20	217.263,60	230.577,50	126.055,60
1	Belanja Pakai Habis	9.615,90	10.577,50	11.635,30	12.798,80	14.078,70	15.486,60
2	Belanja Jasa Kantor	62.330,50	68.563,60	75.420,00	82.961,90	91.258,10	100.384,00
3	Premi Asuransi	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.324	6.956,50	7.652,20	8.417,40	9.259,10	10.185,00
5	DAK	104.824	107.508,40	110.261,70	113.085,50	115.981,60	118.951,8
III.	Pengeluaran Pembiayaan	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
5	Pembayaran Pinjaman Kepada Propinsi	0	0	0	0	0	0
Total Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama		1.745.636,20	1.898.662,70	2.097.045,60	2.358.137,20	2.706.109,80	3.055.690,40

**LAMPIRAN II. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2016– 2021.**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (dalam jutaan rupiah)	target	Rp (dalam jutaan rupiah)	target	Rp (dalam jutaan rupiah)	target	Rp (dalam jutaan rupiah)	target	Rp (dalam jutaan rupiah)	target	Rp (dalam jutaan rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya		1.20.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		4.817.000.000	89	5.883,374	90	5.464,1	90	3.493,5	91	3.704,5	91	3.877,5	91	3.877,5		
			17.006	Pembuatan Buku Perda ttg APBD	Buku Perda APBD	55.000.000	600 buku	67	600 buku	69	600 buku	73	600 buku	75	600 buku	77	600 buku	77	BPKD	
			17.007	Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD	Buku Penjabaran APBD	50.000.000	400 buku	62	400 buku	64	400 buku	67	400 buku	69	400 buku	72	400 buku	72	BPKD	
			17.008	Penyusunan Raperda ttg Perubahan APBD	Buku Perda Perubahan APBD	165.000.000	600 buku	167	600 buku	169	600 buku	171	600 buku	173	600 buku	175	600 buku	175	BPKD	

pelayanan publik, hukum, perencanaan dan pengawasan																			
	17.009	Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD	Buku Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD	185.000.000	400 Buku	187	400 Buku	189	400 Buku	191	400 Buku	193	400 Buku	195	400 Buku	195	BPKD		
	17.010	Penyusunan Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Buku Perda Pertanggungjawaban APBD	150.000.000	170 buku	175	170 buku	181	170 buku	200	170 buku	220	170 buku	240	850 buku	240	BPKD		
	17.011	Penyusunan RaperKDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Buku Peraturan KDH ttg Pertanggungjawaban APBD	130.000.000	170 buku	160	170 buku	159	170 buku	175	170 buku	193	170 buku	212	850 buku	212	BPKD		
	17.021	Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD APBD	Surat Pengesahan DPA-SKPD	33.000.000	55 SKPD	35	55 SKPD	35	55 SKPD	39	55 SKPD	42	55 SKPD	45	55 SKPD	45	BPKD		
	17.022	Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD	Surat Keputusan Pengesahan SPD APBD	15.000.000	55 SKPD	15	55 OPD	15	55 OPD	20	55 OPD	25	55 OPD	25	55 OPD	25	BPKD		
	17.023	Validasi RKA-	Tertib	33.000.000	55 OPD	50	55	52	55	55	55	55 OPD	57	55 OPD	61	55 OPD	61		

			SKPD Perubahan APBD	administrasi keuangan daerah				OPD		OPD								BPKD	
	17.024	Penyusunan dan Pengesahan DPPA-SKPD Perubahan APBD	Surat pengesahan DPPA-SKPD	33.000.000	55 OPD	50	55 OPD	52	55 OPD	55	55 OPD	57	55 OPD	61	55 OPD	61	BPKD		
	17.025	Penyusunan dan Pengesahan SPD Perubahan APBD	Surat pengesahan SPD Perubahan	8.000.000	55 SKPD	8	55 OPD	11	55 OPD	11	55 OPD	14	55 OPD	15	55 OPD	15	BPKD		
	17.026	Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan APBD	Tertib administrasi keuangan daerah	18.000.000	55 OPD	20	55 OPD	22	55 OPD	24	55 OPD	26	55 OPD	29	55 OPD	29	BPKD		
	17.030	Pemutakhiran Data Gaji PNS dan Komputerisasi Cetak Daftar Gaji	Tertib administrasi keuangan daerah	90.000.000	100%	90	100%	100	100%	100	100%	110	100%	110	100%	110	BPKD		
	17.031	Operasional Penyelesaian SP2D	Tertib administrasi keuangan daerah	140.000.000	55 OPD	150	55 OPD	160	55 OPD	160	55 OPD	170	55 OPD	170	55 OPD	170	BPKD		
	17.032	Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK	Tertib administrasi keuangan daerah	50.000.000	100%	50	100%	60	100%	60	100%	70	100%	70	100%	70	BPKD		
	17.033	Pengurusan SKPP	Tertib administrasi keuangan daerah	25.000.000	100%	25	100%	25	100%	30	100%	35	100%	35	100%	35	BPKD		
	17.038	Pemeliharaan Program SAKD	Tertib administrasi	50.000.000	1 paket	60	1 paket	70	1 paket	75	1 paket	80	1 paket	85	1 paket	85	BPKD		

				keuangan daerah															
		17.039	Validasi dan Pembuatan SK Pendukung kegiatan SKPD se-Kab. Wonogiri	Tersedianya SK Pendukung kegiatan seluruh SKPD	10.000.000	55 SKPD	11	55 OPD	12	55 OPD	14	55 OPD	14	55 OPD	15	55 OPD	15	BPKD	
		17.040	Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Tertib administrasi Belanja Tidak Langsung	40.000.000	1 Paket	50	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	50	BPKD	
		17.042	Kegiatan MPT – GR	Terselesaikannya kasus yang ditangani	10.000.000	1 Paket	10	1 Paket	12	1 Paket	12	1 Paket	14	1 Paket	14	1 Paket	14	BPKD	
		17.044	Pengelolaan Kas Daerah	Terjaganya Likuiditas Kas Umum Daerah	20.000.000	1 Paket	25	1 paket	30	1 paket	30	1 paket	35	1 paket	35	1 paket	35	BPKD	
		17.047	Validasi RKA-SKPD APBD	Tervalidasi nya RKA-SKPD APBD	33.000.000	55 OPD	35	55 OPD	37	55 OPD	40	55 OPD	42	55 OPD	45	55 OPD	45	BPKD	
		17.048	Penyusunan Raperda ttg APBD	Tersusunnya Buku Perda APBD	155.000.000	600 Buku	157	600 Buku	159	600 Buku	162	600 Buku	164	600 Buku	165	600 Buku	165	BPKD	
		17.049	Penyusunan RaperKDH ttg Penjabaran APBD	Tersusunnya buku Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD	130.000.000	400 Buku	132	400 Buku	134	400 Buku	136	400 Buku	138	400 Buku	140	400 Buku	140	BPKD	
		17.052	Sosialisasi Perda Pendapatan Daerah	Meningkatnya pendapatannya daerah	25.000.000	100%	25	100%	30	0	0	0	0	0	0	0	30	BPKD	
		17.059	Operasional Penyelesaian, Penelitian/	Terselesaikannya verifikasi	50.000.000	8.000	55	8.000	60	8.000	65	8.000	70	8.000	70	8.000	70	BPKD	

			Verifikasi SPM	SPM tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran															
	17.063	Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Seluruh SKPD	Tersedia nya laporan Keuangan SKPD yang akurat	65.000.000	55 OPD	50	55 OPD	55	55 OPD	60	55 OPD	65	55 OPD	70	55 OPD	70	BPKD		
	17.065	Pengelolaan File Perencanaan Anggaran	Terkelola nya file perencanaan anggaran	15.000.000	55 OPD	30	55 OPD	32	55 OPD	34	55 OPD	36	55 OPD	40	55 OPD	40	BPKD		
	17.071	Hadiah Pelunasan PBB	Terlaksana nya pembelian hadiah pelunasan PBB	750.000.000	1 Paket	755	1 Paket	760	0	0	0	0	0	0	0	760	BPKD		
	17.074	Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga / Karcis	Meningkat nya pendapata n daerah	14.000.000	1 Paket	15	1 Paket	20	0	0	0	0	0	0	0	20	BPKD		
	17.075	Penagihan Pendapatan Daerah	Meningkat nya pendapata n daerah	20.000.000	1 Paket	30	1 Paket	30	0	0	0	0	0	0	0	30	BPKD		
	17.076	Rakor Pendapatan Daerah	Meningkat nya pendapata n d Paerah	25.000.000	1 Paket	30	1 Paket	30	0	0	0	0	0	0	0	30	BPKD		
	17.077	Penarikan Pajak Daerah	Jenis pajak daerah yang diterima	14.000.000	1 Paket	15	1 Paket	15	0	0	0	0	0	0	0	15	BPKD		
	17.079	Penyusunan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan	Tersusun nya pedoman penatausa haan	55.000.000	150 buku	60	150 buku	65	150 buku	72	150 buku	79	150 buku	87	150 buku	87	BPKD		

			APBD	pelaksanaan APBD															
		17.083	Penataan File Bidang Perbendaharaan	Tersusunnya file/dokumen administrasi bidang perbendaharaan	22.000.000	55 OPD	22	55 OPD	25	55 OPD	25	55 OPD	30	55 OPD	30	55 OPD	30	BPKD	
		17.089	Penarikan Retribusi	Jumlah wajib retribusi	12.000.000	1 Paket	14	1 Paket	14	0	0	0	0	0	0	0	14	BPKD	
		17.091	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Meningkatnya pendapatan daerah	693.000.000	1 Paket	984,874	1 Paket	745,6	0	0	0	0	0	0	0	745,6	BPKD	
		17.092	Pemeliharaan Aplikasi PBB	Terpeliharanya Data Base PBB	85.000.000	1 Paket	150	1 Paket	150	0	0	0	0	0	0	0	150	BPKD	
		17.093	Penyusunan Perda tentang Pendapatan Daerah	Tersusunnya Raperda Pendapatan Daerah	20.000.000	1 Paket	25	1 Paket	25	0	0	0	0	0	0	0	25	BPKD	
		17.103	Pemeliharaan Program Aplikasi DARA	Tertib administrasi keuangan daerah	50.000.000	1 paket	60	1 paket	60	1 paket	65	1 paket	70	1 paket	75	1 paket	75	BPKD	
		17.104	Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD	Tertib administrasi keuangan daerah	100.000.000	55 OPD	100	55 OPD	110	55 OPD	121	55 OPD	133	55 OPD	140	55 OPD	140	BPKD	
		17.105	Penyusunan Pelaporan Semesteran Inventarisasi Barang Daerah	Tersusunnya Inventarisasi Aset Daerah	10.000.000	55 OPD	13	55 OPD	13	55 OPD	13	55 OPD	15	55 OPD	17	55 OPD	17	BPKD	
		17.106	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan Inventarisasi	12.000.000	55 OPD	15	55 OPD	15	55 OPD	15	55 OPD	17	55 OPD	19	55 OPD	19	BPKD	

		Inventarisasi Barang Daerah	si Aset Daerah																
	17.107	Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah	Terpeliharanya dokumen kepemilikan Aset Daerah	20.000.000	55 OPD	25	55 OPD	25	55 OPD	30	BPKD								
	17.115	Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB	Meningkatnya pendapatan daerah	20.000.000	1 Paket	20	1 Paket	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	BPKD	
	17.119	Sinkronisasi Laporan Askes	Tercukupinya pengembalian dana potongan askes	20.000.000	100%	25	100%	30	100%	30	100%	35	100%	40	100%	40	100%	40	BPKD
	17.125	Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD	Terpeliharanya sarana aplikasi	78.500.000	1 paket	120	1 paket	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	BPKD	
	17.126	Pemeliharaan Aplikasi Penatausahaan Keuangan SKPD	Terpeliharanya jaringan dan data Aplikasi keuangan SKPD	40.000.000	1 paket	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	BPKD	
	17.129	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah	156.000.000	1 Paket	170	1 Paket	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180	BPKD	
	17.130	Validasi Dokumen Belanja Tidak Langsung	Tersedianya data yang valid	25.000.000	1 Paket	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	BPKD	
	17.131	Pengelolaan file Belanja Tidak Langsung	Tertatanya arsip Belanja Tidak Langsung	5.000.000	1 Paket	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	BPKD	

17.133	Bimtek Akuntansi Berbasis Accrual	Terlaksananya bimtek akuntansi accrual	100.000.000	55 OPD	125	55 OPD	137	55 OPD	150	55 OPD	165	55 OPD	180	55 OPD	180	BPKD	
17.135	Rakor Keuangan Daerah	Terlaksananya Rakor Keuangan daerah	50.000.000	55 OPD	60	55 OPD	70	55 OPD	80	55 OPD	85	55 OPD	90	55 OPD	90	BPKD	
17.136	Pengurusan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain	Terserapnya Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain	15.000.000	1 Paket	20	BPKD											
17.138	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Terlaksananya sosialisasi kebijakan akuntansi pemerintah	110.000.000	55 OPD	125	55 OPD	137	55 OPD	150	55 OPD	165	55 OPD	180	55 OPD	180	BPKD	
17.140	Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi Akrual (APBD TA. 2016)	Terlaksananya pelaporan keuangan yang akuntabel	500.000.000	1 Paket	500	1 Paket	525	1 Paket	525	1 Paket	525	1 Paket	550	1 Paket	550	BPKD	
17.141	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	Buku Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	0	0	100	55 SKPD	110	55 SKPD	120	55 SKPD	130	55 SKPD	130	55 SKPD	130	BPKD	
17.142	Pengadaan Tiang Canang/Panggung Reklame	Terwujudnya Tiang Canang/Panggung Reklame	0	1 Paket	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	BPKD	
17.145	Penyusunan Rancangan Peraturan	Tersedianya Perbup Belanja	12,5	50 buku	18,5	BPKD											

		Bupati Belanja Tidak Langsung	Tidak Langsung																
	17.147	Pengelolaan Papan Reklame	Jumlah Papan Reklame yang dikelola	0	20 unit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	BPKD	
	1.20.05.28	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		747.600.000	82,50	995	85	1.685	87,50	1.783	87,50	1.290	90	1.422	90	1.422	BPKD		
	28.003	Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten	Buku Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten	95.000.000	55 SKPD	95	55 SKPD	95	55 SKPD	95	55 SKPD	100	55 SKPD	105	55 SKPD	105	BPKD		
	28.019	Verifikasi dan Pengelolaan Barang Daerah	Tertib laporan administrasi barang daerah	250.600.000	55 SKPD	325	55 SKPD	350	55 SKPD	400	55 SKPD	450	55 SKPD	500	55 SKPD	500	BPKD		
	28.020	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah	Tertib laporan administrasi barang daerah	76.000.000	55 SKPD	85	55 SKPD	85	55 SKPD	90	55 SKPD	95	55 SKPD	100	55 SKPD	100	BPKD		
	28.047	Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah	Barang Inventaris Milik Daerah	50.000.000	1 paket	60	1 paket	70	1 paket	70	1 paket	80	1 paket	90	1 paket	90	BPKD		
	28.076	Pengadaan Papan Plakat dan Papan nama Kepemilikan asset	jumlah Papan Plakat dan Papan nama Kepemilikan aset	75.000.000	1 paket	100	1 paket	40	1 paket	75	1 paket	90	1 paket	120	1 paket	120	BPKD		
	28.082	Pemeliharaan Program	Jumlah Aplikasi	40.000.000	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	55	1 paket	55	BPKD		

			Aplikasi SIMDA																
	28.083	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Barang Inventaris Milik Daerah	19.000.000	1 paket	35	1 paket	40	1 paket	50	1 paket	60	1 paket	70	1 paket	70	BPKD		
	28.084	Pelelangan Barang Milik Daerah	Barang Inventaris Milik Daerah yang telah dihapus dari daftar inventaris	45.000.000	1 paket	50	1 paket	55	1 paket	60	1 paket	65	1 paket	70	1 paket	70	BPKD		
	28.087	Penyusunan RKBMD dan RKPBM	Jumlah RKBMD dan RKPBM	17.000.000	55 SKPD	20	55 SKPD	20	55 SKPD	25	55 SKPD	25	55 SKPD	25	55 SKPD	25	BPKD		
	28.094	Validasi dan pembuatan SK Penetapan Status penggunaan barang milik Daerah	SK Penetapan Status penggunaan barang milik Daerah	15.000.000	55 SKPD	25	55 SKPD	25	55 SKPD	25	55 SKPD	25	55 SKPD	30	55 SKPD	30	BPKD		
	28.095	Penyusunan Buku daftar hasil pengadaan barang	Buku daftar hasil pengadaan barang	10.000.000	55 SKPD	15	55 SKPD	15	55 SKPD	20	55 SKPD	20	55 SKPD	20	55 SKPD	20	BPKD		
	28.096	Pembangunan Gudang Aset Daerah	Gudang Aset	-	-	-	-	-	1 paket	600	-	-	-	-	1 paket	600	BPKD		
	28.097	Pengamanan dan penertiban Aset Daerah	Tertibnya asset daerah	15.000.000	55 SKPD	20	55 SKPD	20	55 SKPD	30	55 SKPD	30	55 SKPD	30	55 SKPD	30	BPKD		
	28.098	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peserta Bintek	40.000.000	167 orang	40	167 orang	45	167 orang	45	167 orang	50	167 orang	55	167 orang	55	BPKD		
	28.099	Sensus Barang Milik Daerah	Terlaksananya Sensus barang milik	0	0	0	1.075 UPB	700	0	0	0	0	0	0	1.075 UPB	700	BPKD		

			daerah																
		Pendampingan Program Aplikasi SIM Aset Daerah	Jumlah program aplikasi yang dilakukan pendampingan	0	1 Paket	75	1 Paket	75	1 Paket	75	1 Paket	75	1 Paket	75	1 Paket	75	1 Paket	75	BPKD
		Penyusunan Pelaporan Semesteran Inventarisasi Barang Daerah	Jumlah SKPD/OPD se-Kabupaten Wonogiri	0	0	0	0	0	55 SKPD	13	55 SKPD	15	55 SKPD	17	55 SKPD	17	55 SKPD	17	BPKD
		Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Inventarisasi Barang Daerah	Jumlah SKPD/OPD se-Kabupaten Wonogiri	0	0	0	0	0	55 SKPD	30	55 SKPD	30	55 SKPD	30	55 SKPD	30	55 SKPD	30	BPKD
		Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah	Jumlah SKPD/OPD se-Kabupaten Wonogiri	0	0	0	0	0	55 SKPD	30	55 SKPD	30	55 SKPD	30	55 SKPD	30	55 SKPD	30	BPKD
	1.20.05.30	Program Peningkatan Pendapatan Daerah		690.000.000	9,75	980	9,80	915	9,90	2.949,2	3.018,3	750	10,50	3.089,9	10,50	3.089,9			
	30.002	Pengelolaan Data Realisasi Pendapatan Daerah	Laporan realisasi pendapatan daerah	30.000.000	1 Paket	35	1 Paket	40	1 Paket	40	1 Paket	45	1 Paket	50	1 Paket	50	1 Paket	50	BPKD
	30.013	Penyediaan Sarana Pengelolaan PBB dan BPHTB	Pembelian sarana pengelolaan PBB dan BPHTB	450.000.000	1 Paket	475	1 Paket	480	1 Paket	490	1 Paket	500	1 Paket	510	1 Paket	510	1 Paket	510	BPKD
	30.020	Cetak dan Distribusi Dokumen PBB	Dokumen PBB	60.000.000	1 Paket	70	1 Paket	75	1 Paket	80	1 Paket	85	1 Paket	90	1 Paket	90	1 Paket	90	BPKD
	30.021	Pemeliharaan Basis Data PBB	Terkelolan ya Basis Data PBB	0	1 Paket	160	1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	BPKD

		Sosialisasi Perda Pendapatan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Perda tentang Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	80	30	80	35	80	35	240	35	BPKD	
		Hadiah Pelunasan PBB	Jumlah kursi lipat hadiah pelunasan PBB	0	0	0	0	0	2.450	770	2.500	780	2.500	790	7.450	790	BPKD	
		Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga/Karcis	Penggunaan benda berharga (karcis) di pasar, terminal, puskesmas, dan obyek wisata	0	0	0	0	0	1 paket	20	BPKD							
		Penagihan Pendapatan Daerah	Realisasi penerimaan pajak daerah dan ttribusi daerah	0	0	0	0	0	1 paket	30	BPKD							
		Rakor Pendapatan Daerah	Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan pendapatan daerah	0	0	0	0	0	120	30	120	30	120	30	360	30	BPKD	
		Penarikan Pajak Daerah	Jenis pajak daerah yang diterima	0	0	0	0	0	1 paket	20	1 paket	20	1 paket	25	1 paket	25	BPKD	
		Penarikan	Jumlah	0	0	0	0	0	1 paket	15	1 paket	15	1 paket	20	1 paket	20	BPKD	

			Retribusi Daerah	wajib retribusi																
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Persentase realisasi penerimaan PBB	0	0	0	0	0	90%	764,2	92%	783,3	95%	802,9	95%	802,9	BPKD		
			Pemeliharaan Aplikasi PBB	Jenis aplikasi pengelolaan PBB	0	0	0	0	0	1 paket	150	BPKD								
			Penyusunan Peraturan tentang Pendapatan Daerah	Perda pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	0	0	0	0	0	1 paket	25	BPKD								
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang membayar pajak	0	0	0	0	0	650 orang	190	650 orang	200	660 orang	210	660 orang	210	BPKD		
			Pengadaan Tiang Canang/ Panggung Reklame	Jumlah tiang canang/ panggung reklame yang dibangun	0	10 unit	200	5 unit	150	5 unit	100	5 unit	100	3 unit	100	28 unit	100	BPKD		
			Pengelolaan Papan Reklame	Jumlah papan reklame (baliho) dan tiang canang/ panggung reklame milik Pemda Kab.	0	20 unit	40	30 unit	50	35 unit	55	40 unit	60	43 unit	62	43 unit	62	BPKD		

				Wonogiri yang dipelihara															
		1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran		14.187.416.000		21.414,640		26.520		31.621,5		36.744,5		41.838,5		172.326.556		
		01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	60.000.000	55 SKPD	100	55 SKPD	105	55 SKPD	110	55 SKPD	115	55 SKPD	120	55 SKPD	610	BPKD	
		01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik	250.000.000	1 paket	265	1 paket	275	1 paket	280	1 paket	285	1 paket	290	1 paket	1.645	BPKD	
		01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan	11.000.000	1 paket	12,5	1 paket	13,5	1 paket	15	1 paket	17	1 paket	18	1 paket	87	BPKD	
		01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12.000.000	1 paket	12,5	1 paket	13	1 paket	14	1 paket	14	1 paket	15	1 paket	80,5	BPKD	
		01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	110.000.000	1 paket	120	1 paket	125	1 paket	130	1 paket	133	1 paket	140	1 paket	758	BPKD	
		01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan	65.000.000	1 paket	71	1 paket	78	1 paket	86	1 paket	95	1 paket	104	1 paket	499	BPKD	
		01.012	Penyediaan Komponen	Tersedianya alat	12.000.000	1 paket	15	1 paket	16	1 paket	17	1 paket	17	1 paket	19	1 paket	96	BPKD	

			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik dan elektro nika																
		01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia nya kelengkapan risograf, gorden dan penghias ruangan	42.000.000	1 paket	41	1 paket	51	1 paket	61	1 paket	70	1 paket	70	1 paket	335	BPKD		
		01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia nya sarana informasi dan buku peraturan perundang-undangan	4.500.000	1 paket	4,5	1 paket	5	1 paket	5	1 paket	6	1 paket	6	1 paket	31	BPKD		
		01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedia nya makan dan minum rapat dan jamuan tamu	60.000.000	1 paket	78	1 paket	82	1 paket	86	1 paket	91	1 paket	95	1 paket	492	BPKD		
		01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksana nya perjalanan dinas luar daerah	110	1 paket	140	1 paket	150	1 paket	160	1 paket	190	1 paket	200	1 paket	950	BPKD		
		01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksana nya perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000	1 paket	4	1 paket	4,5	1 paket	4,5	1 paket	5	1 paket	5	1 paket	27	BPKD		
		01.020	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Terlaksana nya pembaya	403.416.000	1 paket	500,640	1 paket	550	1 paket	600	1 paket	650	1 paket	700	1 paket	3.404,056	BPKD		

			ran honor PNS dan petugas keamanan kantor															
	01.021	Pengelolaan SJDI	Tersedia nya sumber informasi hukum yang lengkap, akurat dan akuntabel	4.500.000	1 paket	4,5	1 paket	5	1 paket	5	1 paket	6,5	1 paket	6,5	1 paket	32	BPKD	
	01.023	Penataan Arsip Kantor	Terwujud nya penataan arsip kantor	39.000.000	1 paket	46	1 paket	47	1 paket	48	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	280	BPKD	
	01.000	Belanja Listrik PJU	Terlaksana nya belanja listrik/pajak jalan umum	13.000.000.000	1 paket	20.000	1 paket	25.000	1 paket	30.000	1 paket	35.000	1 paket	40.000	1 paket	163.000	BPKD	
	1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		662.000.000		1.549		4.909,5		3.451		819,5		854,5		12.245,5		
	02.003	Pengadaan Gedung Kantor	Terwujud nya gedung kantor	0	0	0	0	600	1 Paket	0	0	0	0	0	0	600	BPKD	
	02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujud nya kendaraan dinas untuk operasional	50.000.000	1 Paket	295	1 Paket	3.600	55 SKPD	2.700	55 SKPD	0		0		6.645	BPKD	
	02.007	Pengadaan Perlengkapan	Tersedia nya	39.000.000	1 paket	567	1 paket	47	1 paket	51	1 paket	51	1 paket	53	1 paket	808	BPKD	

			Gedung Kantor	perlengkap an gedung kantor															
	02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedia nya perangkat komputer, kalkulator, printer, soundsys tem dll	150.000.000	1 paket	165	1 paket	180	1 paket	190	1 paket	220	1 paket	230	1 paket	1.135	BPKD		
	02.010	Pengadaan Meubelair	Tersedia nya meja dan kursi kerja untuk eselon II, almari, meja dan kursi tamu	50.000.000	1 paket	50	1 paket	60	1 paket	60	1 paket	70	1 paket	70	1 paket	360	BPKD		
	02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksana nya pemeliha raan dan perawatan gedung kantor	100.000.000	1 paket	105	1 paket	110	1 paket	115	1 Paket	120	1 paket	120	1 paket	670	BPKD		
	02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	Terlaksana nya pemeliha raan kendaraan dinas	115.000.000	1 paket	120	1 paket	125	1 paket	130	1 paket	135	1 paket	140	1 paket	765	BPKD		
	02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliha ranya perlengkap an gedung kantor	30.000.000	1 paket	32	1 paket	34	1 paket	36	1 paket	38	1 paket	40	1 paket	210	BPKD		
	02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Terlaksana nya perawatan	80.000.000	1 paket	88	1 paket	96	1 paket	106	1 paket	117	1 paket	128	1 paket	615	BPKD		

			Gedung Kantor	peralatan gedung kantor															
	02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terlaksananya pemeliharaan meubelair	1.500.000	1 paket	2	1 paket	2,5	1 paket	3,5	1 paket	3	1 paket	3,5	1 paket	16	BPKD		
	02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik,telepon dan air minum	Listrik,telepon dan air minum	46.500.000	1 paket	125	1 paket	55	1 paket	60	1 paket	65	1 paket	70	1 paket	421,5	BPKD		
	1.20.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		6.000.000		10,5		12,5		12		17		19		77			
	03.006	Penyusunan Data Kepegawaian	Data pegawai	3.000.000	1 paket	4	1 paket	5	1 paket	6	1 paket	7	1 paket	8	1 paket	33	BPKD		
	03.007	Pengambilan Sumpah Janji Pegawai	Jumlah pegawai yang dijumlah	0		2,5	1 paket	2,5	1 paket	0		3	1 paket	3	1 paket	11	BPKD		
	03.012	Penyusunan Bezetting	Laporan bezetting per triwulan	3.000.000	1 paket	4	1 paket	5	1 paket	6	1 paket	7	1 paket	8	1 paket	33	BPKD		
	1.20.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.000.000		110		60		65		120		75		485			
	05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya sosialisasi, diklat dan bintek	55.000.000	1 paket	60	1 paket	60	1 paket	65	1 paket	70	1 paket	75	1 paket	385	BPKD		
	05....	Pembinaan dan Pelatihan	Kegiatan in house	0		50	1 paket	0		0		50	1 paket	0		100	BPKD		

		Pelayanan Bidang Keuangan	training															
	1.20.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		49.000.000		91		96		102		106		125		569		
	06.001	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun nya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	5.000.000	1 Paket	7	1 Paket	7,5	1 Paket	8	1 Paket	8	1 Paket	8,5	1 Paket	44	BPKD	
	06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusun nya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	12.000.000	1 Paket	13	1 Paket	14	1 Paket	15	1 Paket	16	1 Paket	17	1 Paket	87	BPKD	
	06.005	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusun nya dokumen rencana kerja SKPD	5.000.000	1 Paket	7	1 Paket	7,5	1 Paket	8	1 Paket	8	1 Paket	8,5	1 Paket	44	BPKD	
	06.006	Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusun nya dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD	10.000.000	12 kali	12	12 kali	14	12 kali	16	12 kali	18	12 kali	18	60 kali	88	BPKD	
	06.010	Pengelolaan Administrasi	Terlaksana nya	10.000.000	1 paket	12	1 paket	13	1 paket	15	1 paket	16	1 paket	18	1 paket	84	BPKD	

				Keuangan	pengadaan program aplikasi komputer laporan keuangan															
			06.000	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya renstra	7.000.000	1 paket	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1 paket	22	BPKD	
			06.000	Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah	Pengelolaan Webside dan Aplikasi	0		40	1 paket	200	BPKD									



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(B P K D)

Jalan RM. Said Wonogiri Telepon (0273) 322805, Fax. (0273) 322804
W O N O G I R I - 57652

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 140 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menyusun Review Rencana Strategis untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Fungsi dari Review Rencana Strategis sebagaimana Diktum PERTAMA adalah:

1. Sebagai pedoman pencapaian Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
2. Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021.
4. Sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 17 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI, *ly*

†



HARYONO